



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSNADI FERIANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 765797

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.108.000.000

1. Tanah Seluas 314 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 358.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 453 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 1.162.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 588.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 533.000.000

1. MOTOR, HONDA D1802N26L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5 CVT CKD Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0G AT Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 280.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 543.669.389

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.465.169.389

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.465.169.389

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.